



# Fiscal Decentralization and its Impact on Capital Expenditures and Economic Growth in Buru Regency

*(Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pengeluaran Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Buru)*

Tri Wahyuningsih<sup>1✉</sup> dan Indarwati<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Iqra Buru, Namlea, Indonesia.

✉ Email : [triwahyu0578@gmail.com](mailto:triwahyu0578@gmail.com)

Info Artikel :	<input checked="" type="checkbox"/> Artikel Penelitian	<input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian	<input type="checkbox"/> Riview Artikel
Diterima : 19 Okt 2025, Disetujui : 16 Nov 2025, Publikasi On-Line : 17 Nov. 2025			

## Abstract

The study aims to determine the effect of fiscal decentralization on economic growth in Buru Regency, both directly and indirectly through capital expenditure variables. The research method used is explanatory causality using the path analysis method and analysis tools in the form of the SPSS program. The data used in this study are secondary data sourced from BPS (Central Statistics Agency) from 2015 to 2024 in Buru Regency. The results of the study show that directly a) Fiscal decentralization has a negative and significant effect on capital expenditure; b) Fiscal decentralization has a positive and insignificant effect on economic growth. c) Capital expenditure has a negative and insignificant effect on economic growth in Buru Regency; d) The direct effect of fiscal decentralization on economic growth is very large compared to the indirect effect of fiscal decentralization on economic growth through capital expenditure variables. Thus, the Buru Regency regional government needs to strive to increase Regional Original Income (PAD) through innovations in levy collection, regional taxes, and management of Regionally-Owned Enterprises (BUMD) in order to increase the degree of regional fiscal decentralization.

🗒 **Keyword : Fiscal Decentralization; Capital Expenditure; Growth.**

### I. PENDAHULUAN

Zhouhaier, (2012) menyatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah bisa berjalan dengan baik bila pemerintah daerah diberikan otonomi daerah. Salah satu pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya desentralisasi fiskal, yaitu sumber- sumber penerimaan bagi daerah bisa digali dan dipakai sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing (Santosa, 2013). Terwujudnya desentralisasi fiskal bisa memicu pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah (Ikeji, 2011). Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwasanya melalui desentralisasi fiskal pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa terjadi perubahan yang lebih baik.

Alokasi dana dalam bentuk belanja modal oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut (Halim, 2007) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang akan meningkatkan aset atau kekayaan daerah. Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan menyediakan fasilitas pendukung pelayanan publik. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk mendukung produktivitas ekonomi karena jika belanja modal

tinggi, produktivitas ekonomi akan meningkat (Novita, 2012).

PAD yang merupakan penerimaan daerah berharap bisa menaikkan investasi belanja modal pemerintah daerah selain untuk membiayai belanja rutin, sehingga kualitas pelayanan publik bisa maksimal (Putra dan Ulupui, 2015). Belanja modal dipakai untuk pembuatan aset tetap publik yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya, yang ditujukan untuk layanan publik dan petugas. Dalam hal ini, belanja modal yang dipakai untuk layanan publik akan lebih produktif ketimbang belanja modal yang dipakai untuk aparatur daerah (Triyanto dkk, 2017). Tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu mengeluarkan belanja pemerintah dengan efektif untuk menopang aktivitas perekonomian semisal pembangunan sarana prasarana publik, selain itu dengan tepatnya mengalokasikan belanja pemerintah maka diharapkan pendapatan daerah juga bisa terjadi peningkatan (Kusuma, 2016). Belanja modal hendaknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif semisal untuk melaksanakan aktivitas pembangunan (Yovita, 2011). Modebe dkk, (2012), juga berpendapat bahwasanya adanya infrastruktur berkualitas maka produktivitas juga akan meningkat. Belanja modal yang meningkat berharap bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik supaya lebih baik sebab aset tetap daerah yang meningkat merupakan prasyarat dalam memberi pelayanan publik kepada masyarakat yaitu hasil dari pengeluaran belanja modal. Meningkatnya PAD dan belanja modal berharap bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila pengalokasian dana itu tepat dan berjalan sesuai dengan sasaran di Kabupaten Buru.

Isu desentralisasi fiskal sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sudah menarik perhatian banyak ahli, semisal Oates (1993); Bird (1993); Bird, Ebel, dan Wallich (1995); Bahl dan Linh (1992); dan Gramlich (1993). Mereka menyatakan bahwasanya dengan diserahkannya beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga dengan tegas dijelaskan oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Prud'homme (1995), Peterson (1996), Zang dan Zao (1995) di penelitiannya di Amerika Serikat,

Davodi dan Zao (1998) untuk kasus di negara maju, Zang dan Zao (2001) di penelitiannya di India, menyimpulkan bahwasanya ada pengaruh positif desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi daerah.

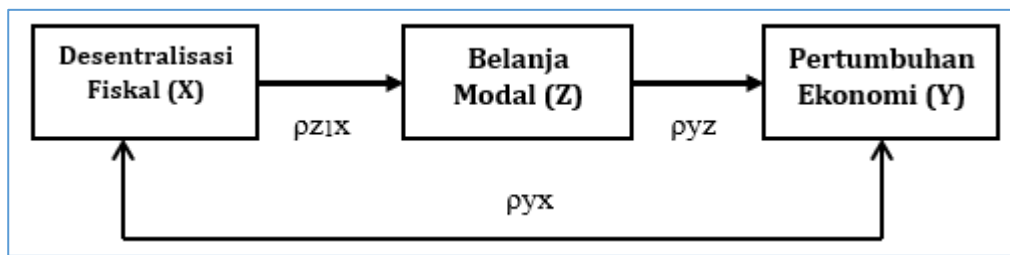
Namun demikian, World Bank (1997a), Martinez dan McNab (2001) mengingatkan bahwasanya desentralisasi fiskal bisa juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal bisa mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro, yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal bisa mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang bisa dipakai untuk melakukan fungsi stabilisasi. Kemudian juga dengan tegas mengenai pengaruh negatif desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh penelitian Phillips dan Woller (1997) untuk kasus di negara-negara berkembang. Atas dasar hal ini peneliti merasa perlu untuk meneliti kembali dengan tujuan untuk menguji dan Menganalisis Dampak Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Belanja Modal di Kabupaten Buru.

## II. METODE PENELITIAN

Tipologi penelitian yaitu eksplanatori, yaitu studi yang dirancang melalui tahapan pengumpulan data yang dibutuhkan, penentuan alat (instrumen) analisis yang dipakai, dan analisis pada data yang dipakai. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung desentralisasi fiskal pada belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru dengan memakai metode analisis jalur dan alat analisis berupa program SPSS. Data yang dipakai di penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 di Kabupaten Buru.

Langkah-langkah pada analisis jalur yaitu sebagai berikut (Wibowo. 2009):

1. Secara sistematis *path analysis* mengikuti pola model struktural, sehingga langkah awal untuk mengerjakan atau penerapan model *path analysis* yaitu dengan merumuskan persamaan struktural dan diagram jalur yang berdasarkan kajian teori tertentu (Riduwan, 2007). Diagram berikut ini memvisualisasikan analisis jalur di penelitian (Gambar 1.).



Gambar 1. Diagram jalur hubungan kausal antar variabel

2. Pendugaan parameter atau perhitungan koefisien *path*. Pada dasarnya koefisien jalur yaitu koefisien regresi yang distandarkan (*standardized path coefficient*), dipakai untuk menerangkan besarnya pengaruh variabel bebas (eksogen) pada variabel lain yang diberlakukan sebagai variabel terikat (endogen). Di dalam analisis jalur, ada pengaruh langsungnya yaitu:
  - a. Pengaruh langsung Desentralisasi Fiskal pada Belanja Modal =  $\rho_{zx}$
  - b. Pengaruh langsung Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi =  $\rho_{yx}$
  - c. Pengaruh tidak langsung atau melalui variabel adalah pengaruh tidak langsung Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal =  $(\rho_{yx} \times \rho_{zy})$
3. Pemeriksaan validitas model, dengan cara melihat asumsi-asumsi untuk analisis jalur

harus sudah terpenuhi. Uji validitas koefisien jalur (*Standardized Coefficient* -  $\beta$ ), untuk melihat tingkat signifikansi dari uji t dengan alpha sebesar 5% (0,05). Dikatakan signifikan, apabila nilai koefisien jalur ( $p$  - *value*) lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha$ ).

4. Melakukan interpretasi model, yaitu menginterpretasikan hasil atau nilai parameter yang ada pada *analysis path* itu.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan uji t pada masing-masing jalur secara parsial diperoleh hasil analisis semisal yang ditunjukkan di tabel 1 dan hasil pengujian koefisien jalur pengaruh langsung antar variabel nampak di Tabel 2..

Tabel 1. Hasil pengujian hipotesis

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Jalur ( $\beta$ )	P-Value	Hasil Pengujian
Desentralisasi Fiskal → Belanja Modal	-0,828	0,002	Signifikan
Belanja Modal → Pertumbuhan Ekonomi	-0,262	0,436	Tidak Signifikan
Desentralisasi Fiskal → Pertumbuhan Ekonomi	0,330	0,322	Tidak Signifikan

Sumber: : Hasil olahan analisis jalur

Tabel 2. Koefisien jalur pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung

Pengaruh Variabel	Pengaruh Kausal	
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Belanja Modal
Desentralisasi Fiskal → Belanja Modal	-0,828	-
Belanja Modal → Pertumbuhan Ekonomi	-0,262	-
Desentralisasi Fiskal → Pertumbuhan Ekonomi	0,330	$(-0,828) \times (-0,262) = 0,217$

Sumber: : Hasil olahan analisis jalur

#### Pembahasan Hasil Penelitian

##### Pengaruh Langsung

##### a. Desentralisasi Fiskal pada Belanja Modal

Data di tabel 1 dan Tabel 1 menunjukkan bahwasanya Desentralisasi fiskal berdampak signifikan pada belanja modal di Kabupaten Buru, hal ini terlihat dari nilai p-value sebesar 0,002 yang lebih kecil ketimbang taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu 5%. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwasanya hipotesis pertama,

yaitu desentralisasi fiskal berdampak signifikan pada belanja modal di Kabupaten Buru terbukti. Artinya, tingginya PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Total Pengeluaran Daerah pada APBD di Kabupaten Buru dan tingginya porsi Belanja Tidak Langsung pada Total Pengeluaran Daerah pada APBD di Kabupaten Buru mengakibatkan kemampuan desentralisasi fiskal dalam memengaruhi belanja modal di Kabupaten Buru menjadi sangat besar sekali.

Besarnya kontribusi desentralisasi fiskal (X) yang secara langsung memengaruhi belanja modal (Z) yaitu:  $\rho_{z.pzx}$  atau  $-0,8282 = 0,68$ . Ini mengandung makna bahwasanya variasi dari perubahan variabel belanja modal sekitar 68 % disebabkan sebab perubahan-perubahan dari variabel desentralisasi fiskal. Sisanya sebesar 32 % diakibatkan faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam persamaan, tetapi ditampung pada variabel gangguan acak e. Koefisien jalur sebesar  $-0,828$  (bertanda negatif) menunjukkan bahwasanya semakin meningkat nilai desentralisasi fiskal, maka semakin menurun belanja modal, dan sebaliknya.

Desentralisasi fiskal berdampak negatif pada belanja modal di Kabupaten Buru bisa disebabkan oleh sebab: a) alokasi dana sering kali lebih besar untuk belanja rutin semisal pegawai, keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, hal ini menyebabkan dana yang diterima dari pusat cenderung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, bukan investasi jangka panjang semisal

infrastruktur yang diukur melalui belanja modal; b) Lemahnya Pengelolaan Anggaran. Pemerintah daerah terkadang belum optimal dalam mengelola anggaran dan dana desentralisasi. Kebijakan pengelolaan anggaran yang kurang efektif ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah menjadi kurang efektif, meskipun sudah menerima kucuran dana dari pusat; c) Keterbatasan Kapasitas Fiskal Daerah. Kabupaten Buru memiliki kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah dan bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kebutuhan pengeluaran tinggi. Keterbatasan ini membuat pemerintah daerah kesulitan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk belanja modal, meskipun ada potensi untuk membangun infrastruktur. Hal ini dibuktikan dengan nilai desentralisasi fiskal yang diukur dengan rasio antara PAD ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Pengeluaran Daerah pada APBD yang masih kecil semisal yang ditunjukkan dalam Tabel 3.

**Tabel 3.** Total pendapatan dan pengeluaran daerah serta desentralisasi fiskal Kabupaten Buru Tahun 2015 - 2024

Tahun	Total Pendapatan (PAD, BHP, BHPB)	Total Pengeluaran Daerah	Desentralisasi Fiskal (persen)
2015	48.440.900	670.959.221	7,21
2016	40.550.609	848.805.154	4,77
2017	62.146.788	797.532.207	7,79
2018	56.983.437	948.919.526	6,00
2019	38.441.054	968.180.686	3,97
2020	44.570.939	932.930.210	4,77
2021	44.369.400	836.086.585	5,30
2022	51.681.981	826.214.156	6,26
2023	47.743.646	826.214.156	5,78
2024	29.578.436	787.058.183	3,76

**Sumber:** BPS, Stitistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (berbagai tahun terbitan) dan Hasil Olah data

Derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Buru hanya berkisar antara 3,67 % di tahun 2024 hingga 7,79 % di tahun 2017 dan angka itu bila dikategorikan, maka termasuk dalam kategori rendah. Temuan hasil penelitian sesuai dengan salah satu hasil studi Mursinto (2004), yang menunjukkan bahwasanya berdasarkan sisi penerimaan dan pengeluaran daerah tidak ada satupun kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang sudah mampu melaksanakan otonomi daerah.

#### b. Belanja Modal pada Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal berdampak tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru, hal ini terlihat dari nilai p-value sebesar 0,436 yang lebih besar ketimbang taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu 5%.

Besarnya kontribusi belanja modal (X) yang secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y) yaitu:  $\rho_{yx.pyx}$  atau  $-0,2622 = 68,64$ . Ini mengandung makna bahwasanya variasi dari perubahan variabel pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8 % disebabkan sebab perubahan-perubahan dari variabel belanja modal. Sisanya sebesar 93,2 % diakibatkan faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam persamaan, tetapi ditampung pada variabel gangguan acak e. Koefisien jalur sebesar  $-0,262$  (bertanda negatif) menunjukkan bahwasanya semakin meningkat nilai desentralisasi fiskal, maka semakin menurun belanja modal, dan sebaliknya.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwasanya hipotesis kedua, yaitu desentralisasi fiskal berdampak signifikan pada belanja modal di

Kabupaten Buru tidak terbukti. Belanja Modal berdampak negatif dan tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru sebab faktor-faktor semisal Belanja Modal yang tidak produktif, Belanja Modal dialokasikan untuk investasi jangka panjang, dan pengaruh investasi swasta yang justru lebih berperan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru. Hal ini disebabkan oleh sebab masih besarnya Ketergantungan pendapatan Kabupaten Buru pada Dana Transfer. Desentralisasi fiskal berpotensi membuat daerah menjadi terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Bila dana transfer ini tidak dipakai secara optimal atau dialihkan untuk pos-pos

selain belanja modal, maka tujuan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai. Dana desentralisasi fiskal yang dialokasikan untuk belanja rutin tidak memiliki dampak signifikan pada sektor pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, belanja modal justru menjadi kunci untuk perbaikan indikator pertumbuhan ekonomi, dan minimnya belanja modal ini berujung pada lambatnya pembangunan. Hal ini dibuktikan di tabel 4, dimana rasio persentase belanja modal pada pengeluaran daerah yang masih kecil di Kabupaten Buru dan tidak terjadi peningkatan disetiap tahun, namun berfluktuasi.

**Tabel 4.** Belanja modal dan rasio belanja modal pada pengeluaran daerah di Kabupaten Buru Tahun 2015-2024

Tahun	Belanja Modal	Rasio Belanja Modal pada Pengeluaran Daerah
2015	198.230.862	29,54
2016	252.688.446	29,76
2017	141.619.175	17,75
2018	264.590.717	27,88
2019	226.407.517	23,38
2020	242.250.301	25,96
2021	173.876.982	20,80
2022	180.263.560	21,82
2023	126.369.191	17,27
2024	104.785.397	13,31

**Sumber:** BPS, Stitistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (berbagai tahun terbitan) dan Hasil Olah data

Belanja modal tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru bisa disebabkan oleh sebab yaitu: a) Fokus alokasi anggaran di Kabupaten buru yang lebih banyak untuk pengadaan aset atau infrastruktur yang belum siap pakai, sehingga dampaknya belum terasa langsung pada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh; dan b) Program yang kurang tepat sasaran, dimana program belanja modal yang tidak efektif atau tidak menyentuh masalah mendasar pada masyarakat bisa menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi.

#### c. Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi

Besarnya kontribusi desentralisasi fiskal (X) yang secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y) yaitu:  $\rho_{yx.pyx}$  atau  $0,3302 = 0,108$ . Ini mengandung makna bahwasanya variasi dari perubahan variabel pertumbuhan ekonomi sekitar 10,8 % disebabkan sebab perubahan-perubahan dari variabel desentralisasi fiskal. Sisanya sebesar 89,11 % diakibatkan faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam persamaan, tetapi ditampung pada variabel gangguan acak e. Koefisien jalur sebesar 0,330 (bertanda positif)

menunjukkan bahwasanya semakin meningkat nilai desentralisasi fiskal, maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya.

Selanjutnya Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh hasil bahwasanya desentralisasi fiskal berdampak tidak signifikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru, yang menunjukkan bahwasanya hipotesis ketiga tidak terbukti. Koefisien jalur bertanda positif menunjukkan bahwasanya semakin meningkat nilai desentralisasi fiskal, maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya. Hal ini terlihat dari nilai p-value sebesar 0,322 yang lebih besar ketimbang taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu 5%. Ini bermakna bahwasanya dalam era otonomi daerah, adanya desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang berdampak pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana, aktivitas belanja dari pegawai negeri di Kabupaten Buru, adanya belanja modal dan investasi pemerintah yang bersifat jangka panjang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru meningkat.

Temuan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan salah satu hasil studi Sasana (2009) yang menerangkan bahwasanya desentralisasi fiskal berdampak signifikan dan mempunyai hubungan positif pada laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Priyarsono dkk (2010) yang menerangkan bahwasanya PAD dan dana perimbangan memberi pengaruh positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil studi ini sesuai dengan hasil studi Parhah (2002) yang menerangkan bahwasanya desentralisasi fiskal berdampak tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia serta Ismail dkk (2004) yang menerangkan bahwasanya desentralisasi penerimaan yang lebih besar ketimbang desentralisasi pengeluaran memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Demikian pula hasil penelitian dari Swasono (2007) yang menyimpulkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dengan indikator fiskal pendapatan asli daerah dan indikator fiskal belanja. Serupa dengan Swasono (2007), hasil penelitian Galela (2011) menyimpulkan ada korelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator fiskal, baik indikator fiskal belanja maupun indikator fiskal penyesuaian pajak daerah.

Desentralisasi fiskal tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi sebab beberapa alasan, diantaranya yaitu: a) Kapasitas Tata Kelola Keuangan Daerah yang Belum Optimal; b) Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat; c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang penting; d) Desentralisasi bisa membuka celah untuk terjadinya praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi yang berujung pada pemborosan anggaran dan menghambat pembangunan. Faktor lain yang menghalangi pertumbuhan ekonomi yaitu bergesernya korupsi dari pejabat pemerintah pusat ke pejabat pemerintah daerah sesudah diterapkannya desentralisasi fiskal (Prud'homme 1995). Korupsi menyebabkan alokasi anggaran menjadi tidak efisien sebab alokasi yang tidak tepat sasaran atau alokasi tepat tetapi biaya terlalu tinggi. Sejak awal desentralisasi, berbagai pihak sudah mengkhawatirkan terdesentralisasinya korupsi ke daerah. Jumlah pejabat eksekutif dan legislatif daerah yang tersangkut masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan kecenderungan meningkat. (Rinaldi, Purnomo, dan Damayanti 2007).

### ***Pengaruh Desentralisasi Fiskal Pada Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal***

Desentralisasi fiskal berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui variabel belanja modal menunjukkan pengaruh yang kecil (0,217) dibandingkan dengan pengaruh langsung desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 0,330. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru lebih banyak dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal dari pada melalui belanja modal. Pengaruh desentralisasi fiskal secara langsung pada pertumbuhan ekonomi lebih besar sebab desentralisasi fiskal memiliki cakupan yang lebih luas dan fundamental, meliputi kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja dengan kebutuhan lokal, mendorong efisiensi layanan publik, dan meningkatkan kemandirian fiskal untuk membiayai pembangunan. Sementara itu, belanja modal yaitu satu mekanisme atau satu bentuk dari implementasi desentralisasi fiskal, yang dampaknya pada pertumbuhan ekonomi lebih terbatas sebab hanya berfokus pada investasi infrastruktur. Jadi, desentralisasi fiskal yaitu kebijakan payung yang menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal yaitu salah satu alat di dalamnya yang berkontribusi pada pertumbuhan itu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sarmini et al. (2010) yang melakukan penelitian di Iran memperoleh hasil bahwasanya desentralisasi fiskal berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Riset dilakukan dengan memakai data periode 2001-2007 dengan memakai indikator desentralisasi fiskal *expenditure share* yang diregresikan dengan metode efek-tetap (*fixed-effect*). Variabel determinan pertumbuhan yang dipergunakan yaitu tarif pajak efektif, tingkat inflasi, dan pertumbuhan penduduk.

## **IV. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian bisa maka ditarik kesimpulan bahwasanya Desentralisasi fiskal berdampak negatif dan signifikan dan pada belanja modal di Kabupaten Buru. Ini bermakna bahwasanya tingginya PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Total Pengeluaran Daerah pada APBD Kabupaten Buru menyebabkan Belanja Modal pada APBD kabupaten yang rendah. Selanjutnya, Desentralisasi fiskal berdampak positif dan tidak signifikan pada pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Buru. Arah positif ini menunjukkan bahwasanya peningkatan desentralisasi fiskal akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru. Belanja modal pada APBD di Kabupaten Buru berdampak negatif dan tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru. Ini bermakna bahwasanya porsi Belanja Tidak Langsung yang sebagian besar untuk Belanja Pegawai menyebabkan rendahnya porsi Belanja Modal pada Total Pengeluaran Daerah pada APBD Kabupaten Buru. Alokasi Belanja Modal pada APBD Kabupaten Buru belum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah sehingga mengakibatkan Belanja Modal pada APBD Kabupaten Buru tidak produktif dan untuk investasi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru lebih banyak dipengaruhi secara langsung oleh desentralisasi fiskal dibandingkan melalui variabel belanja modal.

### Rekomendasi

Rekomendasi yang bisa diberikan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yaitu: a) Perbaiki Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah perlu berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dalam pungutan retribusi, pajak daerah, dan pengelolaan BUMD. Ini akan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal; b) Optimalkan Belanja Modal. Dengan cara: *pertama*, Fokus pada Proyek Strategis. Pastikan belanja modal diarahkan pada proyek infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan dan memiliki dampak ekonomi riil, semisal fasilitas publik yang meningkatkan produktivitas atau dukungan untuk sektor usaha. *Kedua*, lakukan perencanaan anggaran yang matang dan pengawasan ketat pada pelaksanaan proyek-proyek supaya tidak terjadi kebocoran dan hasilnya efektif; c) Tingkatkan faktor pendukung pertumbuhan ekonomi semisal kembangkan Sumber Daya Manusia dan ciptakan iklim investasi yang kondusif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, R. W; Linh, J. (1992). Urban finance in development countries. New York: Oxford University Press.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2025). Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. <https://maluku.bps.go.id/publication/download.html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru. (2025). Buru Dalam Angka. <https://burukab.bps.go.id/publication/download.html>.
- Bird, R. M. (1993). Threading the fiscal laby rinth: some issues in fiscal decentrali zation. National Tax Journal, 46(3), hal. 207-227.
- Bird, R. M; Ebel, R; Wallich, C. (1995). Decentralization of the socialist state: Intergovernmental finance in transition economics. Washington DC: World Bank.
- Davoodi; Hamid; Heng-fu Zou. (1998) Fiscal decentralization and economic growth: a cross-country study. Journal of Urban Economics 43: hal. 244-257.
- Galela, Muhammad Ridhwan. (2011). The Impact of Fiscal Decentralization on Regional Economic Growth in Indonesia. Unpublished master thesis, Hitotsubashi University.
- Gramlich, E. M. (1993). A Policy Maker's Guide to Fiscal Decentralization. National Tax Journal Vol. XLVI (2), 229 – 235.
- Halim, A. (2007). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). UPPAMP YKPN. (Novita, 2012)
- Ikeji ChibuezeC. (2011). Politics of Revenue Allocation in Nigeria: A Reconsideration of Some Contending Issues. Politics of Revenue of Policy and StrategicStudies, 1 (1), 121-136.
- Ismail, Abd. Ghafar B. dkk. (2004). Fiscal Decentralization And Economic Growth: Evidence From Selected Muslim Countries. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol. 9, No. 2, Desember 2004:109 – 116.
- Kusuma, Hendra (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 9 (1), 1-11.
- Lin; Liu. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago. Vol49.Hal : 1-21.
- Martinez, V. J. M; McNab, R. (2001). Fiscal decentralization, economic growth, and democratic governance. Working Paper.
- Modebe, N. J; Okafor, R. G; Onwumere, J. U. J; Ibe, I. G. (2012). Impact of recurrent and capital expenditure on Nige i ' economic growth. European Journal of Business and Management, 4(19), 66-74.
- Mursinto, Djoko. (2004). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan serta Elastisitas Pendapatan Asli Daerah pada Kategori Pemerintahan Kabupaten dan Kota pada Awal Otonomi Daerah di Provinsi Jawa

- Timur, Disertasi, Tidak Dipublikasikan, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, 46(3), hal. 237-243.
- Peterson, G. E. (1996). *Decentralization in Latin America: Learning through experience*. Washington DC: World bank.
- Phillips, K. L; Woller, G. (1997). Does fiscal decentralization lead to economic growth? Working Paper.
- Prud'homme, Remy. (1995) The dangers of Decentralization. *The World Bank Research Observer*, Vol. 10, No. 2, hal. 201-220.
- Putra, P.G.M; Ulupui, I.G.K.A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11.3: 836-877.
- Priyarsono, DS. dkk. (2010). Desentralisasi Fiskal, Tax Effort, dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empirik Kabupaten/Kota di Indonesia 2001-2008. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Vol. XI, No. 1, Juli 2010:21-34.
- Parhah, Siti. (2002). Kontribusi Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Data Cross-Section Tahun 2000. Yogyakarta.
- Rinaldi, Taufik; Marini Purnomo; Dewi Damayanti. (2007) Fighting corruption in decentralized Indonesia: Case studies on handling local government corruption. Jakarta: The Local Government Corruption Study (LGCS). The World Bank Office Indonesia.
- Riduwan, E.A.Kuncoro. (2007). Cara Memakai dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis). Bandung. Alfabeta.
- Santosa, Budi. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah pada Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 5 (2), 130-143.
- Sarmimi, Ahmad J., Saeed Karimi P. L., Gholamreza Keshavarz H., and Muhammad Alizadeh. (2010) Fiscal decentralization and economic growth in Iran. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 4(11): hal. 5490-5495.
- Sasana, Hadi. (2009) Peran Desentralisasi Fiskal Pada Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Terakreditasi, Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No.1, Juni 2009:103 – 124.
- Swasono, Fauziah. (2007). Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indonesia. *Economic and Finance in Indonesia*, Vol. 55 (2), hal. 109-134.
- Triyanto, Danang; Setyo Tri Wahyudi; Candra Fajri Ananda. (2017). The Effect of Capital Expenditure on Local Own-Source Revenue: Study In East Java Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10 (2), 137- 144.
- World Bank. (1997a). *The World development Report*. New York: Oxford University Press.
- Wibowo Arif. (2009). *Pengantar Analisis Jalur*. Surabaya: LPPM Unair Surabaya.
- Yovita, F. M; Utomo, D. C. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Pada Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008–2010) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Zhang, T; Zou, H. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of Public Economics*, 67, hal. 221-240.
- Zhang, T; Zou, H. (2001). The growth impact of intersectoral and intergovernmental allocation of public expenditure: With application in China and India. *China Economics*.
- Zouhaier, H; Karim, K. M. (2012). Institutions, investment and economic growth. *International Journal of Economics and Finance*, 4(2), 152-162.



Copyright© 2025. Tri Wahyuningsih, Indarwati

